



## ANALISIS ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN (APBK) PADA SEKTOR PENDIDIKAN DI KABUPATEN PIDIE JAYA

Alfi Syahril Fuadi Jaya<sup>1\*</sup>, Zakaria<sup>2</sup>, Muhammad Iswanda<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Prodi Ekonomi FKIP Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh 23111, Indonesia

\*Email korespondensi : [alfisyahril@unsyiah.ac.id](mailto:alfisyahril@unsyiah.ac.id),

Diterima Juni 2021; Disetujui Juli 2021; Dipublikasi 30 Juli 2021

**Abstract:** This study aims to analyze the number of funds allocated and realized from the district revenue and expenditure budget (APBK) in the education sector in the Pidie Jaya Regency. This study uses a descriptive type of research while the approach is quantitative. The subjects in this study were the Education Office and the Regional Finance and Assets Revenue and Management Office (PPKAD) of Pidie Jaya Regency, while the object of this research was the revenue and expenditure budget of the education sector of Pidie Jaya Regency for the 2012-2015 fiscal year. The data collection technique used is documentation data and analyzed using descriptive methods using the effectiveness formula. The results showed that the Pidie Jaya APBK allocation for the education sector exceeded the mandate of the law, reaching 26.39%-35.56% annually, however, from that number of budgets, more is allocated to indirect types of expenditure with the personnel expenditure component reaching 82.15%-85.47% of the total education budget each year. The level of budget realization reaches 95.20% -98.87% annually, this shows an effective budget realization with the realization of realization above 90%..

**Keywords :** *allocation, realization, education sector.*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jumlah dana yang dialokasikan dan direalisasikan dari anggaran pendapatan dan belanja kabupaten (APBK) pada sektor pendidikan di kabupaten Pidie Jaya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif sedangkan pendekatan adalah pendekatan kuantitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah Kantor Dinas Pendidikan dan Kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Pidie Jaya, sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah anggaran pendapatan dan belanja sektor pendidikan Kabupaten Pidie Jaya tahun anggaran 2012-2015. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data dokumentasi dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan rumus efektivitas Hasil penelitian menunjukkan bahwa alokasi APBK Pidie Jaya untuk sektor pendidikan melebihi amanat undang-undang yaitu mencapai 26,39%-35,56% setiap tahunnya, tetapi dari sejumlah anggaran itu lebih banyak dialokasikan untuk jenis belanja tidak langsung dengan komponen belanja pegawai yang mencapai 82,15%-85,47% dari total anggaran pendidikan setiap tahunnya. Tingkat realisasi anggaran mencapai 95,20%-98,87% setiap tahunnya, hal ini menunjukkan realisasi anggaran yang efektif dengan pencapaian realisasi diatas 90%.

**Kata kunci :** *alokasi, realisasi, sektor pendidikan*

Pendidikan mempunyai peranan sentral dalam pembangunan bangsa dan negara, kecerdasan dan kemampuan akan membentuk karakter bangsa

dimasa depan, yang banyak ditentukan oleh pendidikan yang diajarkan kepada anak-anak saat ini (Bedjo: 2004).

Fakta yang menunjukkan betapa besar pengaruh pendidikan terhadap bidang kehidupan lain ini ternyata tidak dibarengi oleh peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan prestasi pendidikan Indonesia yang belum memuaskan ditingkat Nasional maupun Internasional.

Indeks Pembangunan Pendidikan (*Education Development Index*) untuk semua atau *education for all* di Indonesia menurun dari peringkat 65 pada tahun 2010 ke peringkat 69 pada tahun 2011. Berdasarkan data dalam *Education For All* (EFA) *Global Monitoring Report* (2011): "*The Hidden Crisis, Armed Conflict and Education*" yang dikeluarkan Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO), menyebutkan bahwa Indeks Pembangunan Pendidikan berdasarkan data tahun 2008 adalah 0,934. Nilai ini menempatkan Indonesia di posisi ke-69 dari 127 negara di dunia.

Tantangan pertama yang harus dihadapi oleh para pengelola pendidikan adalah masalah pendanaan. Sebagai ilustrasi, rendahnya kualitas gedung sekolah, terutama SD, merupakan salah satu dampak keterbatasan kemampuan pemerintah dalam memobilisasi dana untuk sektor pendidikan. Pendidikan di Indonesia pernah mengalami hal yang sangat memprihatinkan dari dimensi anggaran, sebagaimana yang pernah sampaikan Suryani (2002) dalam Kompas . Anggaran pendidikan pada tahun 1995/1996 hanya 13,8% dari APBN dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2001 menjadi 5,8% (Irianto, 2013). Pada tahun 2004 DPR telah menetapkan anggaran pendidikan hendaknya merealisasikan amanat

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, mengenai pengalokasian dana pendidikan dalam pasal 49 ayat 1, menyatakan bahwa, dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Kabupaten (APBD/K).

Peningkatan mutu pendidikan di Indonesia tidak selancar yang diharapkan, upaya evaluasi terhadap pembelajaran sekolah sudah dilakukan pemerintah melalui Implementasi Standar Nasional Pendidikan. Jaya (2019) penerapan dan implementasi 8 standar nasional pendidikan sangat diharapkan oleh masyarakat dan dipersepsikan oleh masyarakat sudah tergolong sangat baik. Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu standar dari 8 standar nasional pendidikan sudah selayaknya dan sepatutnya mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah. Biaya pendidikan merupakan komponen sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa biaya, sehingga perlu ada dukungan dari pemerintah, seperti Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk pendidikan. Menurut Supriadi (2004: 3), Biaya (*cost*) dalam pengertian ini memiliki cakupan luas, yakni semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga. Sementara menurut Fattah (2002), Anggaran sendiri terdiri dari dua sisi, penerimaan dan pengeluaran. Sisis penerimaan berisi besarnya dana yang diterima

dari setiap sumber dana, sedangkan sisi pengeluaran berisi alokasi besarnya biaya pendidikan yang harus dibiayai. Menurut Bastian (2006), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan “rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk satuan uang untuk kurun waktu satu tahun tahunan dan berorientasi pada tujuan kesejahteraan publik”

Jalaluddin (2009) mengatakan bahwa partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, dan evaluasi anggaran secara simultan baik secara parsial maupun signifikan mempengaruhi kinerja aparatur pemerintah daerah di pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam perumusan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran harus mengikuti kaidah yang telah ditetapkan oleh aparatur dan partisipasi masyarakat baik dalam perumusan, pelaksanaan, maupun pertanggungjawaban anggaran harus mengikuti kaidah yang telah ditetapkan oleh aparatur dan partisipasi masyarakat dalam kedua perumusan tersebut. Pelaksanaan, dan akuntabilitas anggaran.

Pemerintah daerah memang memiliki beberapa sumber keuangan daerah, seperti dana perimbangan (DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil), pendapatan asli daerah (PAD) dan pinjaman. Tapi pada kenyataannya, rata-rata peranan PAD dalam APBD hanya sekitar 7%. Sementara itu, rata-rata tertimbang rasio dana perimbangan terhadap pengeluaran rutin adalah 1,4 yang menunjukkan bahwa tidak banyak dana perimbangan yang bisa digunakan untuk keperluan di luar anggaran rutin. Jelas bahwa Pemda memiliki tanggung jawab yang besar dan bersifat jangka panjang di sektor pendidikan, tetapi tidak memiliki sumber dana yang cukup dan stabil untuk mendanai. Jika situasinya tidak berubah, Daerah tidak akan mampu

memenuhi 20% anggaran untuk pendidikan seperti yang diamanatkan UU Sisdiknas dan pada gilirannya ada risiko terjadi penurunan kualitas SDM sebagai dampak otonomi daerah.

Beberapa hal berikut ini akan memberi gambaran tentang alokasi APBD untuk sektor pendidikan. Qanun ACEH No.5 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan pendidikan dalam pasal 43 ayat 2 menyatakan bahwa pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/kota (APBK) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan di Aceh. Pidie Jaya merupakan salah satu kabupaten di Aceh yang baru didirikan pada tahun 2007. Kabupaten ini terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683 ), pada tanggal 2 Januari 2007. Yang menarik dengan Pidie Jaya adalah kabupaten ini didirikan setelah ditetapkan Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan satu tahun sebelum ditetapkannya Qanun ACEH Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Aceh.

Ditambah lagi dengan kondisi pendidikan yang masih kurang memadai, hal itu ditandai dengan belum meratanya pendidikan di Pidie Jaya dan masih ada sekolah-sekolah dengan ruangan kelas yang masih dalam kondisi rusak, seperti yang tertera dalam publikasi kabupaten Pidie Jaya dalam

angka tahun 2014 yang dipublikasikan melalui website resmi pemerintah Pidie Jaya membuktikan bahwa dari 8 kecamatan di Pidie Jaya hanya 7 kecamatan yang memiliki Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Kejuruan hanya 5 sekolah yang tersebar di 5 kecamatan. Ditambah lagi dengan puluhan sampai ratusan ruangan kelas yang masih rusak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Besaran jumlah dana APBK Pidie Jaya yang dialokasikan untuk sektor pendidikan. 2) Besaran jumlah realisasi dana APBK Pidie

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Pendidikan di Indonesia**

Pendidikan adalah usaha sadar untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi didiknya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (UU RI No.20 Tahun 2003).

Irianto (2013) yang mendefinisikan Pendidikan sebagai Investasi memaparkan bahwa dalam pandangan tradisional dalam beberapa dekade dipahami sebagai bentuk pelayanan sosial yang harus diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yaitu dalam bentuk public service atau jasa pelayanan umum dari negara kepada masyarakat yang tidak memberikan dampak langsung bagi perekonomian masyarakat, sehingga menimbulkan opini bahwa pembangunan sektor pendidikan hanyalah memakan anggaran tanpa jelas manfaatnya. Tetapi cara pandangan ini sudah

mulai berubah sejalan dengan ditemukannya pemikiran dan bukti ilmiah akan peran fungsi vital pendidikan dalam memosisikan manusia sebagai kekuatan utama sekaligus sebagai prasyarat bagi kemajuan pembangunan dalam berbagai sektor. Irianto (2013) menjelaskan bahwa pembangunan sektor pendidikan dengan manusia sebagai fokus intinya telah memberikan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi suatu Negara melalui peningkatan keterampilan dan kemampuan produksi dari tenaga kerja.

Laisina et al (2015) dalam penelitiannya dengan judul pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan terhadap PDRB melalui indeks pembangunan manusia di Sulawesi Utara tahun 2002-2013. Penelitian ini menggunakan metode analisis jalur (path analysis). Berdasarkan hasil penelitian, pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan memiliki pengaruh terhadap indeks pembangunan manusia sedangkan di sektor kesehatan tidak memiliki pengaruh. Pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan ke pertumbuhan ekonomi melalui indeks pembangunan manusia bersifat positif. Sedangkan di sektor kesehatan bersifat negatif terhadap indeks pembangunan manusia. Peneliti berpendapat tidak berpengaruhnya pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia karena selama periode penelitian pemerintah Provinsi Sulawesi Utara lebih banyak mengalokasikan anggarannya dalam pembangunan sarana infrastruktur di bidang kesehatan.

### **Pengalokasian dana APBD/K**

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

No.52 tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah tahun 2016. Penganggaran belanja langsung dalam belanja daerah dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah kepada kepentingan publik. Tujuan prioritas kebijakan terpenuhinya skala dan lingkup kebutuhan masyarakat yang dianggap paling penting dan paling luas jangkauannya, agar alokasi sumberdaya dapat digunakan/dimanfaatkan secara ekonomis, efektif dan efisien. Mengurangi tingkat resiko dan ketidakpastian serta tersusunya program atau kegiatan yang lebih realistis, seperti:

- Prioritas Pendidikan
- Prioritas Kesehatan
- Prioritas Infrastruktur, Dll

Prioritas pendidikan merupakan salah satu sektor dalam pengalokasian APBD/K yang sangat diperhatikan oleh pemerintah, hingga ditetapkan Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, mengenai pengalokasian dana pendidikan dalam pasal 49 ayat 1, menyatakan bahwa, dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD/K).

### **Realisasi dana APBD/K**

Realisasi mempunyai arti yang berbeda-beda, menurut kamus besar bahasa Indonesia (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/realisasi>)

realisasi mempunyai arti proses menjadikan nyata; perwujudan dan lain lain, dan anggaran menurut Nafarin (2013) “Anggaran (Butget) merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan untuk jangka waktu tertentu”. Dan dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah juga disebutkan bahwa APBD/K adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Maka dapat dikatakan bahwa ralisasi merupakan suatu perencanaan yang akan diwujudkan dengan proses hingga menjadi nyata perencanaan tersebut, bila dikaitkan dengan APBD/K maka Realisasi APBD/K adalah perwujudan atau kenyataan dari rancangan keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah daerah, yang telah diwujudkan dengan proses mulain dari rencana keuangan tahunan pemerintah daerah hingga pelaksanaannya yang diijalankan oleh pemerintah daerah.

### **Belanja Sektor Pendidikan**

Pengembangan SDM melalui pendidikan menyokong langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, dan kerana pengeluaran untuk pendidikan harus dipandang sebagai investasi yang produktif dan tidak semata mata dilihat sebagai suatu yang konsumtif tanpa melihat balikan yang jelas (rate of return).

Belanja merupakan konsekuensi karena adanya program dan kegiatan serta mempunyai karakter bahwa masukan alokasi belanja dapat diukur dan diperbandingkan dengan pengeluarannya, masalah pembiayaan

pendidikan/pendanaan pendidikan merupakan salah satu isu utama yang dibahas dalam ekonomi pendidikan. Dalam beberapa literatur ekonomi pendidikan, pembahasan mengenai pembiayaan pendidikan lebih menitik beratkan pada pendidikan formal. Maka pembiayaan pendidikan dapat diartikan sebagai kajian tentang bagaimana pendidikan dibiayai, siapa yang membiayai, dan siapa yang perlu dibiayai dalam suatu proses pendidikan.(Suharsaputra, 2013:289).

Penelitian Habeahan (2015) dengan judul analisis pengaruh pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Pakpak Bharat (Sumatera Utara) Periode 2004-2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah disektor pendidikan berpengaruh negatif terhadap IPM. Peneliti berpendapat tidak signifikannya peengaruh pengeluaran pemeirntah di sektor pendidikan terhadap IPM karena belum optimalnya pelaksanaan program- program pendidikan seperti pendidikan gratis untuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, program beasiswa bagi siswa tidak mampu yang membutuhkan biaya yang sangat banyak, terlebih lagi jumlah penduduk yang juga terus bertambah tiap tahunnya menjadi beban tersendiri bagi pemerintah untuk menyediakan pelayanan pendidikan dalam jumlah yang besar. Selain itu pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan tidak terfokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi guru dan siswa

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem pendidikan Nasional, mengenai pengalokasian dana pendidikan dalam

pasal 49 ayat 1, menyatakan bahwa, dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD/K). Khusus di Aceh juga menetapkan Qanun Aceh No.5 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan pendidikan dalam pasal 43 ayat 2 menyatakan bahwa pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/kota (APBK) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan di Aceh.

Dalam PP No. 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan pasal 3, terdapat beberapa jenis pembiayaan pendidikan, yaitu:

- a. Biaya satuan pendidikan; yang terdiri dari: biaya investasi (lahan pendidikan dan selain lahan pendidikan); Biaya Operasi (personalia dan nonpersonalia); bantuan biaya pendidikan; beasiswa.
- b. Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan; meliputi biaya investasi (lahan pendidikan dan selain lahan pendidikan); biaya operasi (personalia dan nonpersonalia)
- c. Biaya pribadi peserta didik

### **Pembiayaan Pendidikan**

Wagner (dalam Wilantari, 2012) mengemukakan teori pengeluaran pemerintah yang terkenal dengan sebutan “law of ever increasing activity” dan kemudian diuji kembali oleh Peacock

dan Wiseman. Teori ini menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat. Tendensi ini oleh Wagner disebut dengan hukum selalu meningkatnya peranan pemerintah. Teori Rostow dan Musgrave (dalam Mubaroq, 2013) memperkenalkan model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah. Teori ini menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pada tahap awal terjadinya perkembangan ekonomi, presentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar karena pemerintah harus menyediakan fasilitas dan pelayanan seperti pendidikan, kesehatan dan transportasi.

Biaya pendidikan merupakan biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan merupakan biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.

Pengeluaran untuk pendidikan, penelitian-penelitian yang tidak berbasis mencari untung, kesehatan, rekreasi dan lain-lain sebagai pengembangan sumber daya manusia. Berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui sistem produktivitas yang kompleks dan efisien.

Dalam bukunya Bastian (2006:132) memaparkan bahwa, "sejumlah daerah memang mengklaim telah mengalokasikan 20 persen dari dana APBD/K untuk Pendidikan. Akan tetapi, gaji

guru dimasukkan kedalamnya, sementara anggaran ditingkat sekolah sama saja". Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa dana 20 persen dari APBD/K untuk pendidikan harus dipisah dari gaji pendidikan dan biaya kedinasan.

Pemerintah hendaknya mempunyai kepedulian yang sangat tinggi terhadap kepentingan bidang pendidikan dalam menciptakan tenaga kerja yang mempunyai keterampilan tinggi. Untuk itu perlu usaha untuk memperbesar pengalokasian dana yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Anggaran pendidikan diperlukan untuk membantu investasi yang diperlukan untuk pembangunan kualitatif dan pembangunan kuantitatif.

Pentingnya pembiayaan pendidikan telah dibuktikan dalam beberapa penelitian (Muhajir 2013), (Ikhwan: 2015), dengan adanya pembiayaan pendidikan yang besar akan mengakibatkan:

1. Pengaruh positif terhadap pendapatan per kapita masyarakat
2. Akan menurunkan angka melek huruf, hal ini dibuktikan setiap peningkatan 1% anggaran pendidikan akan menurunkan angka melek huruf sebesar 0,44%

Hal itu membuktikan bahwa pemerintah harus betul betul memperhatikan pembiayaan untuk sektor pendidikan sebagai upaya untuk meningkatkan ekonomi melalui pendapatan per kapita masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang tertera dalam pembukaan UUD 1945,

Pengeluaran biaya pendidikan akan

ditentukan oleh komponen-komponen kegiatan pendidikan yang meliputi pengadaan sarana dan prasarana, serta biaya satuan. Sebuah anggaran ditentukan oleh kedua unsur tersebut yaitu pendanaan dan pengeluaran (Iqbal, 2007)

#### METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, yaitu memberikan gambaran penelitian sesuai dengan komponen penelitiannya. Penelitian atas pengalokasian APBK untuk prioritas pendidikan sesuai dengan amanat Undang-undang dan atau Qanun. Serta meneliti realisasi anggaran yang telah dialokasikan untuk sektor pendidikan. Penelitian ini dilakukan berdasarkan observasi lapangan yaitu dengan melakukan penelitian terhadap kenyataan yang telah berlangsung.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pidie Jaya dengan lokasi penelitian di Kantor Dinas pendidikan dan Kantor Dinas Pendapatan, pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Pidie Jaya.

Yang menjadi Subjek dalam penelitian ini adalah dinas yang relevan dalam mengelola anggaran pendidikan yaitu dinas pendidikan kabupaten Pidie Jaya dan dinas yang relevan dalam mengelola keuangan daerah yaitu Dinas Pendapatan, pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pidie Jaya. Sedangkan objek penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Dana APBK tahun 2012-2015.
2. Pengalokasian anggaran pendidikan tahun 2012-2015.
3. Realisasi anggaran pendidikan 2012-2015.

Data dalam penelitian ini menggunakan data

Dokumenter. Kemudian menggolongkan data berdasarkan dimensi waktu yaitu data runtut waktu (time-series) tahunan dari tahun 2012 sampai 2015. Data runtut waktu digunakan untuk melihat pengaruh perubahan dalam rentang waktu tertentu. Yang dibedakan menjadi: 1) Harian, 2) Mingguan, 3) Bulanan, 4) Kuartalan, 5) Tahunan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis persentase Perkomponen, untuk menghitung komponen piutang terhadap total aktiva dengan rumus:

$$= \frac{\text{piutang}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Dalam peneliti, maka peneliti akan mempresentasikan salah satu jenis komponen belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBK) yaitu komponen belanja pendidikan terhadap total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau pengalokasian komponen belanja pendidikan terhadap keseluruhan Jumlah APBK. Dengan menggunakan rumus:

$$= \frac{\text{Total Anggaran untuk Pendidikan}}{\text{Total APBK}} \times 100\%$$

Untuk mengetahui Realisasi anggaran pendidikan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif yaitu untuk memberikan gambaran tentang realisasi anggaran pendidikan. Dengan menggunakan rumus efektivitas yaitu dengan persamaan sebagai berikut. Miles dan Huberman (Snandar, 2012:34) yang dikutip oleh Nurhaliza 2014, yaitu:

Keterangan:

EF = Efektivitas

R = Realisasi Anggaran

T = Anggaran yang tersedia

Menurut (Mahmudi:2014) dalam mengukur



selisih anggaran baik menguntungkan maupun tidak menguntungkan antara realisasi dengan anggaran, harus diketahui tingkat efektivitas dalam pencapaian target dan tingkat efisiensi belanja, sehingga besaran nominal anggaran lebih dengan realisasi dapat dinilai signifikan atau tidak. Maka nilai untuk mengukur efektivitas dapat dikategorikan sebagai berikut:

- Sangat efektif : 100%
- Efektif : 90%-99%
- Cukup Efektif : 80%-89,9%
- Kurang efektif : 60%-79,9%
- Tidak efektif : <60%

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Pengalokasian Dana APBD/K Untuk Sektor Pendidikan Sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang pengelolaan keuangan Daerah, dalam pengalokasian anggaran pendidikan di Kabupaten Pidie Jaya terdiri dari dua jenis belanja yaitu:

1. Belanja tidak langsung
2. Belanja langsung terdiri dari 3 jenis anggaran belanja yaitu: 1) Belanja pegawai 2) Belanja barang dan jasa 3) Belanja modal

Tabel 4.1 Pengalokasian APBK Pidie Jaya Sektor Pendidikan tahun anggaran 2012-2015

Tahun	jumlah			
	APBD (Rp)	Belanja sektor pendidikan		
		Anggaran (Rp)	persentase	
2012	Rp 438.350.998.386	Rp 142.217.413.886	32,44%	
2013	Rp 512.534.046.526	Rp 182.244.199.397	35,56%	
2014	Rp 703.552.556.318	Rp 221.097.830.615	31,43%	
2015	Rp 931.121.841.717	Rp 245.699.684.544	26,39%	

Sumber: Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 tahun 2012, 2013, 2014 dan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 tahun 2015.

Anggaran belanja sektor pendidikan kabupaten Pidie Jaya pada tahun 2012-2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

tahun	Anggaran Pendidikan	Belanja tidak Langsung		Belanja Langsung	
	Jumlah	Jumlah	persen	Jumlah	persen
2012	Rp142.217.413.886	Rp121.554.707.586	85,47%	Rp20.662.706.300	14,53%
2013	Rp186.751.643.117	Rp154.721.292.909	82,85%	Rp32.030.350.208	17,15%
2014	Rp232.257.678.049	Rp192.147.741.416	82,73%	Rp40.109.936.633	17,27%
2015	Rp245.699.684.544	Rp201.830.807.691	82,15%	Rp43.868.876.853	17,85%

(Sumber: Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 tahun 2012, 2013, 2014 dan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 tahun 2015.(diolah).

Belanja tidak langsung dialokasikan pada satu komponen belanja yaitu belanja pegawai dan belanja langsung dialokasikan pada tiga komponen belanja yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Untuk melihat pengalokasian komponen-komponen belanja pendidikan pada tahun 2012 dengan rincian komponen belanja adalah sebagai berikut:

No	Jenis Belanja	Belanja Tidak Langsung		Belanja Langsung	
		Jumlah Anggaran	Persen	Jumlah Anggaran	Persen
	<b>Belanja Pendidikan</b>	<b>Rp121.554.707.586</b>		<b>Rp20.662.706.300</b>	
2.1	Belanja Pegawai	Rp121.554.707.586	100,00%	Rp 3.039.035.200	14,71%
2.2	Belanja Barang dan Jasa			Rp 11.948.982.100	57,83%
2.3	Belanja Modal			Rp 5.674.689.000	27,46%

(Sumber: Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 tahun 2012 tentang perubahan pendapatan dan belanja kabupaten Pidie Jaya tahun anggaran 2012,(diolah))

### Realisasi Anggaran Sektor Pendidikan

Realisasi APBK Pidie Jaya Untuk sektor sektor pendidikan dapat dilihat dari jumlah anggaran yang dihabiskan dari pengalokasian anggaran APBK untuk sektor pendidikan. Untuk mengetahui realisasi anggaran pendidikan di kabupaten Pidie Jaya dengan Realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Jenis Belanja	Jumlah			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	persen
	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>121.544.707.856</b>	<b>120.494.644.080</b>	<b>1.050.063.776</b>	<b>99,14</b>
2.1	Belanja Pegawai	121.544.707.856	120.494.644.080	1.050.063.776	99,14
	<b>Belanja Langsung</b>	<b>20.662.706.300</b>	<b>20.110.554.490</b>	<b>552.151.810</b>	<b>97,33</b>
2.1	Belanja Pegawai	3.039.035.200	2.991.474.500	47.560.700	98,44
2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.948.982.100	11.801.479.090	147.503.010	98,77
2.3	Belanja Modal	5.674.689.000	5.317.600.900	357.088.100	93,71
	<b>Jumlah</b>	<b>142.207.414.156</b>	<b>140.605.198.570</b>	<b>1.602.215.586</b>	<b>98,87</b>

(Sumber: Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2013 pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten Pidie Jaya tahun anggaran 2012)

## **Pembahasan**

Dari hasil penelitian tentang pengalokasian dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja kabupaten Pidie Jaya untuk sektor pendidikan tahun anggaran 2012-2015, dapat diketahui bahwa:

### **Pengalokasian APBK Untuk Sektor Pendidikan**

Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota (APBK) dan Qanun Aceh No.5 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan pendidikan yang menyatakan bahwa pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/kota (APBK) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan di Aceh.

Sebagai salah satu kabupaten di Aceh, Pidie Jaya telah mengalokasikan anggaran pendidikan melebihi amanat undang-undang maupun Qanun Aceh yaitu mencapai 32,44 persen dari total APBK Pidie Jaya pada tahun 2012 dan mengalami kenaikan menjadi 35,56 persen dari total APBK Pidie Jaya pada tahun 2013, kemudian terjadi penurunan menjadi 31,43 persen dari total APBK Pidie Jaya pada tahun 2014, dan turun lagi menjadi 26,39 persen dari total APBK Pidie Jaya pada tahun 2015, terjadinya penurunan persentase pada

anggaran sektor pendidikan tahun 2014 dan 2015 dikarenakan terjadi kenaikan yang sangat signifikan pada anggaran belanja Dinas Pekerjaan Umum, kenaikannya mencapai 100% dari anggaran sebelumnya pada setiap tahunnya.

Pengalokasian dana pendidikan di Kabupaten Pidie Jaya lebih banyak dihabiskan untuk membiayai belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan untuk pegawai/PNS, hal ini terlihat dari jumlah anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan lebih banyak dialokasikan pada jenis belanja tidak langsung yaitu komponen belanja pegawai, dengan jumlah pengalokasiannya pada tahun 2012 yang mencapai 85,47 persen dari total anggaran pendidikan, sedikit mengalami penurunan pada tahun 2013 menjadi 82,85 persen dari total anggaran pendidikan, kemudian pada tahun 2014 berjumlah 82,73 persen dari total anggaran pendidikan, dan pada tahun 2015 juga masih berada dikisaran 82,15 persen dari total APBK.

Hal ini sehubungan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Indra (2006:132) yang menyatakan bahwa sejumlah daerah memang mengklaim telah mengalokasikan 20 persen dari dana APBK untuk Pendidikan. Akan tetapi, gaji guru dimasukkan kedalamnya, sementara anggaran ditingkat sekolah sama saja kemudian Hasil penelitian ini juga sehubungan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nina Toyamah dan Syaikhu Usman (2004) melalui Lembaga Penelitian SMERU yang mengkaji tentang alokasi anggaran pendidikan di Era Otonomi Daerah: implikasi terhadap pengelolaan pelayanan pendidikan dasar yang menyimpulkan bahwa banyak daerah di Indonesia dalam mengalokasikan anggaran

pendidikan lebih banyak dihabiskan hanya untuk belanja pegawai/guru.

Lembaga *Public Expenditure Analysis and Capacity Strengthening Program* (PECAPP) pernah melakukan penelitian tentang anggaran pendidikan di Pidie Jaya tahun anggaran 2013 yang menyatakan bahwa anggaran tersebut sebanyak 82 persen dari keseluruhan belanja pendidikan dialokasikan untuk belanja pegawai mulai dari gaji dan insentif Guru yang berjumlah 3.943 orang dari semua jenjang pendidikan baik yang PNS maupun Non-PNS. Besarnya porsi belanja pegawai hanya menyisakan sedikit celah dalam peningkatan mutu pendidikan, hasil yang sama juga didapatkan dalam penelitian ini, yaitu pada tahun 2013 dari sejumlah anggaran yang dialokasikan untuk sektor pendidikan, 82,85 persen diantaranya dihabiskan untuk belanja Pegawai berupa Gaji dan Tambahan Penghasilan bagi Pegawai dilingkungan dinas pendidikan.

Pengalokasian yang tepat sasaran akan mampu mengembangkan potensi-potensi pendidikan, hal ini sehubungan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Ikhwan (2015) yang membahas tentang pengaruh pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dan PDRB per kapita terhadap pembangunan pendidikan di Provinsi Aceh menyimpulkan bahwa Peningkatan 1 Persen pengeluaran pemerintah sektor pendidikan akan meningkatkan angka melek huruf sebesar 0.44 persen dan mampu mendongkrak perekonomian,

Hal ini juga sehubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhajir (2013) tentang analisis pengaruh belanja pemerintah sektor kesehatan dan pendidikan terhadap pendapatan per kapita di Provinsi Aceh yang menyimpulkan bahwa belanja

pemerintah sektor kesehatan dan belanja pemerintah sektor pendidikan, kedua sektor tersebut memberikan pengaruh positif terhadap pendapatan per kapita di Provinsi Aceh. Namun khusus untuk belanja pemerintah sektor pendidikan memberi pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan per kapita yaitu 95 persen.

Dari belanja langsung anggaran lebih banyak dialokasikan untuk program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, hal ini sehubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra Riansah dan Sajuli (2013) tentang kajian pemanfaatan APBK untuk sektor Pendidikan di Aceh yang menyimpulkan bahwa pemanfaatan pembiayaan pendidikan di Aceh difokuskan untuk meningkatkan pendidikan 9 tahun (SD dan SMP), pengalokasian tersebut digunakan untuk belanja barang/jasa dan belanja modal pembangunan pendidikan.

Anggaran pembangunan sektor pendidikan di Pidie Jaya terus mengalami perubahan kearah yang lebih baik hal ini dibuktikan dengan perubahan pada komponen belanja modal yang terus mengalami kenaikan setiap tahunnya dari tahun 2012 hanya mempunyai 27,46 persen terhadap total anggaran belanja langsung mengalami kenaikan pada tahun 2013 menjadi 32,57 persen dari total anggaran belanja langsung dan juga mengalami kenaikan kenaikan yang signifikan di tahun 2014 mencapai 74,64 persen terhadap total anggaran belanja langsung, dan pada tahun 2015 juga masih berkisar di 71,52 persen dari total anggaran belanja langsung, belanja modal adalah jenis belanja infrastruktur dan pengadaan fasilitas-fasilitas pendidikan seperti pengadaan peralatan kantor, belanja pengadaan perlengkapan kantor, belanja

kontruksi gedung-gedung, belanja pengadaan buku-buku untuk perpustakaan dan lain-lain, belanja ini merupakan suatu progres yang bagus dalam memperbaiki hal-hal yang menjadi masalah yang sesuai dengan latar belakang penelitian yaitu belum meratanya sekolah sekolah, masih banyak ruangan kelas yang rusak, dan lain-lain (Pidie Jaya Dalam Angka 2014).

### **Realisasi Anggaran Sektor Pendidikan**

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi anggaran pendidikan pada tahun 2012 mencapai 98,87 persen dari total anggaran pendidikan hal ini menunjukkan kinerja yang sangat bagus oleh Dinas Pendidikan karena mampu memaksimalkan belanja dari anggaran yang ada, kemudian pada tahun 2013 realisasinya yaitu 97,04 persen dari total anggaran pendidikan, dan pada tahun 2014 realisasinya mencapai 95,20 persen dari total anggaran pendidikan, penurunan setiap tahunnya bukanlah hal yang buruk karena dinas pendidikan mampu menghemat anggaran pada anggaran belanja pegawai (Belanja Tidak Langsung). Tetapi realisasi 2015 tidak didapatkan datanya oleh peneliti dikarenakan masih dalam proses pelaporan dibagian akuntansi Dinas Pendapatan, pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan dari data mentah yang peneliti dapatkan laporan pertanggungjawaban anggaran baru di tanda tangan oleh pemerintah kabupaten Pidie Jaya pada bulan Oktober tahun anggaran berikutnya, hal ini sesuai dengan Abdullah (2011) yang menyatakan bahwa Pertanggungjawaban pelaksanaan APBK dilakukan oleh kepala daerah dengan menyampaikan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK kepada

DPRD, berupa laporan keuangan yang sudah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. kemudian realisasi anggaran sektor pendidikan Kabupaten Pidie Jaya setiap tahunnya efektif karena selalu berada diatas 95% dari total alokasi, hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh (Mahmudi : 2014) yang menyatakan bahwa realisasi anggaran harus diketahui tingkat efektivitas dalam pencapaian target dan tingkat efesiensi belanja, sehingga besaran nominal anggaran lebih dengan realisasi dapat dinilai signifikan atau tidak. tingkat efesiensi belanja, dikatakan afektif apabila berada dikisaran 90%-99% jumlah realisasinya.

Surplus anggaran pada belanja sektor pendidikan setiap tahunnya akan digunakan untuk pembiayaan pada APBK tahun yang akan datang untuk menutup defisit anggaran, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri dalam negeri No.13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pasal 60 ayat 1 butir a bahwa salah satu penerimaan pembiayaan adalah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA).

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengalokasian dana APBK Pidie Jaya untuk sektor pendidikan selama 4 tahun anggaran (tahun anggaran 2012 sampai dengan tahun anggaran 2015) telah melebihi amanat Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dan Qanun Aceh No.5

tahun 2008 tentang penyelenggaraan pendidikan yang menyatakan daerah harus mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20 persen dari total APBD/APBK untuk sektor pendidikan. Pada tahun anggaran 2012 mencapai sebesar 32,44 persen dan terjadi peningkatan pada tahun anggaran 2013 mencapai 35,56 persen dari total APBD Pidie Jaya, kemudian terjadi penurunan pada tahun anggaran 2014 menjadi 31,43 persen dan terjadi penurunan lagi pada tahun anggaran 2015 menjadi 26,39 persen dari total APBD Pidie Jaya. Tetapi pengalokasian anggaran pendidikan lebih banyak digunakan untuk komponen belanja tidak langsung yaitu belanja pegawai yang mencapai 85,47 persen pada tahun 2012 sedikit mengalami penurunan pada tahun 2013 menjadi 82,85 persen dari total anggaran sektor pendidikan, dan pada tahun 2014 mengalami penurunan hanya 0,12 persen menjadi 82,73 persen dan juga mengalami sedikit penurunan pada tahun anggaran 2015 menjadi 82,15 persen dari total anggaran sektor pendidikan Kabupaten Pidie Jaya. Namun pengalokasian anggaran belanja langsung terus mengalami perubahan ke arah yang lebih baik hal itu dapat dilihat pada komponen belanja modal yang terus mengalami peningkatan, pada tahun 2012 yang hanya mendapat alokasi sebesar 27,46 persen mengalami kenaikan pada tahun 2013 menjadi 32,57 persen dari total anggaran belanja langsung kemudian mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun anggaran 2014 menjadi 74,64 persen dan pada tahun 2015 menjadi 71,52 persen dari total anggaran belanja langsung untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan yang

dilaksanakan dalam bentuk program program penyelenggaraan pendidikan.

2. Realisasi anggaran sektor pendidikan Kabupaten Pidie Jaya selama 4 tahun anggaran (tahun anggaran 2012 sampai dengan tahun anggaran 2015) pencapaiannya sebesar 98,87 persen dari total alokasi anggaran sektor pendidikan pada tahun anggaran 2012 dan terjadi penurunan pada tahun 2013 menjadi 97,04 persen dan juga mengalami penurunan pada tahun anggaran 2014 menjadi 95,20 persen dari total anggaran sektor pendidikan, kemudian pada tahun 2015 tidak diberikan datanya oleh Dinas PPKAD Kabupaten Pidie Jaya karena masih dalam proses pelaporan. Dengan demikian realisasi anggaran sektor pendidikan setiap tahunnya efektif, karena pencapaian realisasi anggaran setiap tahunnya terhadap target yang ingin dicapai melebihi 90 persen.

#### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan, maka saran yang dapat peneliti sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya sebagai penentu arah kebijakan diharapkan terus meningkatkan pengalokasian anggaran untuk sektor pendidikan daripada sektor pembangunan lainnya, dan pengalokasian pada anggaran belanja tidak langsung sektor pendidikan diharapkan semakin dikurangi pengalokasiannya dan lebih ditingkatkan pada anggaran belanja langsung untuk meningkatkan pembangunan pendidikan ke arah yang lebih baik.
2. Dinas pendidikan sebagai pengelola keuangan sektor pendidikan diharapkan terus mempertahankan kinerja yang sudah bagus dan

meningkatkan kinerjanya yang masih kurang untuk mencapai target-target yang diinginkan dimasa yang akan datang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R. (2011). *Pelaksanaan Otonomi Luas*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Agus, I. (2013). Pendidikan Sebagai Investasi Dalam Pembangunan Suatu Bangsa. Jakarta : Kencana.
- Bastian, I. (2006). *Akuntansi Pendidikan*. Jakarta: Penerbit Erlangga,
- Bedjo. (2004). *Perhatian orang tua keluarga miskin terhadap pendidikan anaknya di banjar utara kota banjarmasin*. Banjarmasin: Universitas Lampung Mangkurat.
- Fattah, N. (2004). *Ekonomi dan pembiayaan pendidikan*, bandung: Remaja
- Ikhwan, M. (2015). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Pendidikan dan PDRB per kapita Terhadap Pembangunan Pendidikan di Provinsi Aceh.(Online), (<http://etd.unsyiah.ac.id>), diakses 9 Januari 2016).
- Jalaluddin & Bahri, D. (2009) Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Tujuan Anggaran, dan Evaluasi Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah ( Studi Empiris pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kota Banda Aceh). *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi*, vol. 2, no. 1, 2009, pp. 44-53.
- Laisina, C., et al. (2015). Pengaruh Pegeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan Terhadap PDRB Melalui Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 15. No. 4 ISSN : 2302-2663
- Muhajir. (2013). Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah Sektor Kesehatan dan Pendidikan Terhadap Pendapatan per kapita di Provinsi Aceh. (Online), (<http://etd.unsyiah.ac.id>), diakses 9 Januari 2016).
- Nafarin, M. (2013). *Penganggaran Perusahaan*. Jakarta: Salemba Empat
- Peraturan Pemerintah (2008) Nomor 48 tentang pendanaan pendidikan
- Permendagri (2015) Nomor 52 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah tahun 2016
- Pidie Jaya Dalam Angka (Pidiejayakab.bps.go.id, diunduh 10 Desember 2015).
- Qanun Aceh (2008) Nomor 5 Tahun 2008 Tentang penyelenggaraan pendidikan di aceh.
- Suharsaputra, & Falah, N. (2013). *Administrasi pendidikan*. Bandung: Refika aditama.
- Supriadi, D. (2004). *Satuan Biaya Pendidikan Dasar Dan Menengah : Rujukan Bagi Penetapan Kebijakan Pembiayaan Pendidikan Pada Era Otonomi Dan Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suryadi, A. (2002) kompas 24 Juni 2002.
- Undang-Undang No. 20 tahun 2003, tentang sistem pendidikan Nasional.
- \_\_\_\_\_. 2007. Undang-undang No.07 tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya.
- \_\_\_\_\_. Kamus Besar Bahasa Indonesia. [Online]. Tersedia di [kbbi.kemdikbud.go.id/entri/realisasi](http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/realisasi). Diakses 3 April 2021

---

▪ *How to cite this paper :*

Jaya, A.S.F., Zakaria, & Iswanda, M. (2021).  
Analisis Alokasi Dan Realisasi Anggaran  
Pendapatan Dan Belanja Kabupaten  
(APBK) Pada Sektor Pendidikan Di  
Kabupaten Pidie Jaya. *Jurnal Dedikasi  
Pendidikan*, 5(2), 587–601.